

GOVERNUR ANWAR HAFID

Dorong Pembentukan
Badan Pengelola
Geopark Danau Poso



GOVERNUR Anwar Hafid menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan yang menyampaikan usulan percepatan pembentukan Geopark Danau Poso, Kamis (3/9/2026). **FOTO: IST**

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan yang menyampaikan usulan percepatan pembentukan Geopark Danau Poso, Kamis (3/9/2026) di ruang kerja Gubernur Sulteng.

Rombongan dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal terkait langkah strategis yang perlu dilakukan agar Danau Poso dapat segera bergerak menuju status geopark nasional.

Salah satu langkah yang dinilai paling mendesak adalah pembentukan badan pengelola geopark di Kabupaten Poso.

Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan mendorong agar komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso segera dilakukan, termasuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas percepatan pembentukan badan pengelola.

“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark.”

Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa dasar awal pengembangan geopark sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki SK, sehingga tahapan selanjutnya adalah pembentukan badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Poso.

Baca **DORONG** Hal. 7

Pemkab Parigi Moutong
Usulkan Pembenahan
Fasilitas Kesehatan
ke Kemenkes



BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase (Ketiga dari kiri) foto bersama dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (keempat dari kiri) usai melakukan pertemuan di Ruang Rapat 215 Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026). **FOTO: IST**

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mengusulkan pembenahan dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Usulan itu disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, saat bertemu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat 215 Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Erwin didampingi Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran dan

Baca **PEMKAB** Hal. 7

LEBIH 230 PETUGAS DITURUNKAN

PLN UP3 Palu Percepat
Pemeliharaan Infrastruktur



PETUGAS PLN melakukan pekerjaan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan dan menjaga keandalan sistem kelistrikan di Sulbagsel. **FOTO: IST**

SULTENG RAYA - Lebih dari 230 petugas teknis diturunkan untuk mempercepat pekerjaan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan pada sistem interkoneksi Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang juga menyuplay sistem kelistrikan di Palu, Sulawesi Tengah.

Pemeliharaan ini dilakukan demi mengoptimalkan performa infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan listrik secara berkelanjutan

pada sistem kelistrikan tersebut.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Suluttenggo, Noven N. Koropit menyampaikan bahwa saat ini proses pemeliharaan sedang berlangsung.

“Saat ini lebih dari 230 teknisi sudah dikerahkan untuk percepatan proses pemeliharaan, mari kita berdoa agar pekerjaan ini dapat selesai sesuai dengan jadwal,” tutur Noven.

Selama proses pemeliharaan berlangsung pada fasilitas sistem interkoneksi ini, terjadi penurunan daya mampu pasok. Untuk menjaga kestabilan pasokan listrik, PLN UID Suluttenggo mengimplementasikan manajemen pengaturan beban secara bergilir sekitar 1 – 4 jam di beberapa titik wilayah kerja PLN UP3 Palu dan sekitarnya.

Noven menambahkan bahwa langkah penyesuaian

ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan preventif pada sistem kelistrikan terinterkoneksi guna memastikan keandalan pasokan daya ke depan.

“Beberapa hari terakhir sedang dilakukan pemeliharaan infrastruktur pada sistem interkoneksi. Hal ini berpengaruh langsung pada pasokan daya di wilayah kerja PLN UP3 Palu. Pekerjaan ini sangat penting untuk menjaga kestabilan

sistem dan mengoptimalkan performa kelistrikan secara berkelanjutan,” tambah Noven.

PLN UID Suluttenggo mengimbau seluruh pelanggan di wilayah UP3 Palu untuk memantau pembaruan informasi jadwal pengaturan beban melalui aplikasi PLN Mobile, akun media sosial resmi PLN, maupun kanal WhatsApp Channel PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) setempat. 𐄂



PT PERTAMINA Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan Management Walk Through (MWT) di Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Makassar, Kamis (3/9/2026). **FOTO: IST**

TINJAU AFT HASANUDDIN

Pertamina Pastikan Keandalan Avtur
untuk Konektivitas Indonesia Timur

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memastikan keandalan layanan energi bagi sektor transportasi udara. Komitmen tersebut diperkuat melalui

kegiatan Management Walk Through (MWT) di Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Makassar, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan MWT menjadi bagian dari perhatian

manajemen Pertamina terhadap kesiapan sarana dan fasilitas, keandalan operasional, serta penerapan aspek keselamatan dan kualitas

Baca **PERTAMINA** Hal. 7

RAPBN 2027 RP4.097 TRILIUN

Safri: Sulteng
Jangan Hanya
Jadi Penopang
Ekonomi

SULTENG RAYA - Besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai hampir Rp4.097 triliun harus diikuti dengan kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan daerah, termasuk Sulawesi Tengah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengatakan anggaran negara yang besar tidak cukup hanya diukur dari besarnya belanja pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” kata Safri, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Aktivitas pertambangan, kawasan industri dan hilirisasi berkembang pesat, terutama di Morowali dan Morowali Utara.

Baca
RAPBN
Hal. 7



Rute Penerbangan IMIP–Palu Resmi Beroperasi

SULTENG RAYA - Kehadiran PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus menggerakkan perekonomian Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menunjang operasional di kawasan industri terintegrasi berbasis nikel, IMIP menyediakan konektivitas udara yang mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan di dalamnya. Hadirnya fasilitas Bandara domestik PT IMIP dapat mempercepat mobilitas pekerja, manajemen, mitra usaha, investor, maupun pihak-pihak terkait.



BANDARA domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, pada Kamis (03/09/2026). **FOTO: HUMAS IMIP**

Kali ini pihak Bandara domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, pada Kamis (03/09/2026). Perjalanan udara perdana itu menggunakan pesawat Air Bus maskapai Super Air Jet A320 dengan nomor penerbangan IU 2254 menuju Palu memuat 158 penumpang dari kapasitas 180

Baca **RUTE** Hal. 7

Patroli Tim Patra Amankan Pelaku Curanmor

SULTENG RAYA – Situasi kamtibmas di sejumlah wilayah Kota Palu menjadi perhatian personel Tim Patra Satbrimobda Sulteng saat melaksanakan patroli malam, Kamis (3/9/2026) dini hari. Selain menyambangi warga dan pemuda yang masih berkumpul, personel juga merespons temuan adanya penangkapan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) saat melintas di Jalan Veteran.

Dalam patroli tersebut, personel menyambangi beberapa titik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat pada malam hari. Kepada warga dan pemuda, personel menyampaikan imbauan kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan adanya tindak kriminalitas di lingkungan mereka.

Saat melintas di Jalan Veteran, personel mendapati adanya penangkapan terhadap seorang terduga pelaku curanmor. Melihat situasi tersebut, personel Tim Patra segera memberikan bantuan pengamanan terhadap terduga pelaku untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi kejadian.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, terduga pelaku kemudian diserahkan kepada personel Pol-

sek Mantikulore untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasubbagbinlatops Satbrimobda Sulteng AKP Ajrun G. Pambudi mengatakan kehadiran personel dalam patroli tidak hanya bertujuan memantau situasi kamtibmas, tetapi juga memberikan respons ketika menemukan kejadian yang membutuhkan tindakan kepolisian.

“Personel yang melaksanakan patroli diharapkan selalu peka terhadap situasi di sekitarnya. Ketika menemukan adanya kejadian kriminalitas, personel dapat memberikan bantuan pengamanan dan selanjutnya menyerahkan penanganan kepada fungsi kepolisian yang berwenang,” ujarnya.

Personel juga memberikan pemahaman kepada warga yang berada di sekitar lokasi agar tidak mengambil tindakan sendiri. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan menghindari tindakan main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dan penegakan hukum kepada pihak kepolisian.

Patroli kemudian dilanjutkan dengan menyusuri sejumlah ruas jalan dan titik aktivitas masyarakat di wilayah Kota Palu sebelum kembali menuju Mako Detasemen Gegana. **AMR**



PERSONEL Patroli Patra, saat mengamankan seorang pelaku curanmor di Jalan Veteran, Kelurahan Tanamodindi, Kamis (3/9/2026) dini hari. **FOTO: TIM PATRA**

PLN ULP Siau Dukung Pertumbuhan Usaha Lewat Penyambungan Listrik 82.500 VA

SULTENG RAYA – Maknai Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 dengan aksi nyata, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Siau resmi melakukan penyambungan listrik baru berdaya 82.500 VA untuk mendukung 5 operasional PT Gading Murni Perkasa 2. Langkah ini menjadi wujud komitmen PLN dalam menghadirkan pelayanan yang responsif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di wilayah kepulauan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Sultutenggo), Usman Bangun, menegaskan bahwa PLN siap menjadi mitra andal bagi seluruh pelaku usaha dalam menyediakan pasokan listrik yang cukup dan berkualitas.

“Hari Pelanggan Nasional momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kami menyadari bahwa keandalan pasokan listrik adalah kunci utama

berjalannya roda perekonomian dan produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk selalu memberikan solusi kelistrikan yang cepat, mudah, dan andal demi mendukung pertumbuhan investasi hingga ke pelosok daerah,” ucap Usman.

Senada dengan itu, Manager PLN ULP Siau, Fendi A. Rare’a, menyampaikan pelayanan listrik ini merupakan bentuk nyata komitmen pelayanan PLN yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

“Hari Pelanggan Nasional bagi kami bukan sekadar seremoni, melainkan momen untuk membuktikan bahwa pelayanan PLN dapat memberikan dampak langsung yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ungkap Fendi.

Bagi pelaku usaha, ketersediaan pasokan listrik yang memadai bukan hanya sekadar tersambungnyajaringan, melainkan menjadi energi penggerak operasional, pendorong produktivi-

tas, serta pembuka peluang ekspansi bisnis.

Apresiasi tinggi juga disampaikan Manager PT Gading Murni Perkasa 2, Charles, atas respons cepat dan pelayanan prima yang diberikan oleh PLN ULP Siau hingga proses penyalaaan berjalan lancar.

“Kami mengucapkan terima kasih. Bagi kami, kepastian pasokan listrik ini sangat krusial untuk menunjang seluruh kegiatan operasional perusahaan. Pelayanan dari PLN sangat profesional dan memuaskan,” ungkap Charles.

Melalui penyambungan listrik berdaya 82.500 VA ini, PLN menegaskan kesiapannya untuk terus mendampingi serta mengakomodasi kebutuhan energi sektor industri dan bisnis di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kepulauan Siau. Dengan semangat “Melayani dengan Sepenuh Hati”, PLN terus berinovasi untuk memberikan pengalaman pelayanan kelistrikan terbaik, andal, dan berkelanjutan. **777**



TEKNISI PLN sedang melakukan pengecekan gardu panel listrik setelah PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Siau resmi melakukan penyambungan listrik baru berdaya 82.500 VA untuk mendukung operasional PT Gading Murni Perkasa 2. **FOTO: DOK.PLN**



APRISMAN Masa (tengah) didampingi tim kuasa hukumnya, usai mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana sumpah atau keterangan palsu, yang dilaksanakan di ruang Ditreskrimum Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026). **FOTO: KIRIMAN APRISAL**

Polda Sulteng Diminta Evaluasi Penghentian Kasus Dugaan Surat Palsu

SULTENG RAYA – Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) diminta untuk mengevaluasi kembali penghentian penyelidikan kasus dugaan tindak pidana sumpah atau keterangan palsu dan penggunaan surat palsu yang dilaporkan Aprisman Masa.

Melalui kuasa hukumnya, Novriyadiansyah, S.H menyampaikan permintaan tersebut dalam Gelar Perkara Khusus di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026).

Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/234/VIII/2025/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tertanggal 30 Agustus 2025. Dalam laporan itu, Yayuk Sunarti dan Imam Sutarto tercatat sebagai terlapor.

Dalam pertemuan itu, Novriyadiansyah menegaskan persoalan yang dilaporkan bukan sengketa kepemilikan tanah atau upaya meminta kepolisian membatalkan putusan pengadilan perdata.

Fokus keberatan, menurutnya adalah dugaan adanya peristiwa pidana dalam pembuatan dan penggunaan sejumlah dokumen tanah yang dibuat pada 2022.

Dokumen yang dipersoalkan antara lain Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Maret 2022, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), serta Surat Penyerahan Hibah tertanggal 29 Maret 2022.

Yang menjadi titik tekan pelapor adalah keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 yang disebut telah terbit sejak 2000.

“Persoalan yang harus dijawab justru apakah ketika dokumen tanggal 26–29 Maret 2022 dibuat, objek tanah yang diterangkan di dalamnya sudah bersertifikat atau belum,” demikian dijelaskan, Novriyadiansyah.

Pelapor menilai, apabila berdasarkan data pertanyaan objek tersebut ternyata telah tercakup dalam SHM Nomor 10, maka perlu didalami bagaimana kemudian muncul keterangan yang menyatakan kondisi berbeda.

Tidak hanya itu, pelapor meminta penyelidikan menguji siapa yang memberikan keterangan, apa dasar pengetahuannya, serta apakah pihak yang membuat maupun menggunakan dokumen mengetahui kondisi objek tanah sebenarnya.

Fakta lain yang dianggap penting adalah kegiatan pengembalian batas SHM Nomor 10 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Palu.

Menurut paparan pelapor, pengembalian batas dilakukan pada 2 Agustus 2023, sebelum perkara perdata Nomor

72/Pdt.G/2024/PN Pal diajukan.

Dalam kegiatan tersebut, berdasarkan data yang disampaikan pelapor, BPN secara tertulis menyatakan sebagian SHM Nomor 00010/Tatura Selatan/2000 dikuasai secara fisik oleh Imam Sutarto dengan luas sekitar 500 meter persegi.

Lampiran berita acara juga disebut memuat gambar mengenai penunjukan Imam Sutarto.

Fakta inilah yang kemudian dipersoalkan pelapor. Sebab, setelah pengembalian batas tersebut, Imam Sutarto bersama Fatkhusani disebut mewakili Yayasan Citra Buana Mandiri dalam perkara perdata dan menggunakan sejumlah dokumen tahun 2022 sebagai alat bukti.

Lalu, dokumen tersebut digunakan sebagai bukti P-8a berupa SKPT, P-9 berupa Surat Pernyataan Hibah, dan P-10 berupa Surat Penyerahan.

Pelapor meminta kepolisian mendalami apakah pada saat dokumen tersebut digunakan, Imam Sutarto telah mengetahui bahwa objek yang dikuasainya telah diidentifikasi dalam pengembalian batas BPN sebagai bagian dari SHM Nomor 10.

Lelapor menilai dugaan penggunaan surat perlu diuji secara tersendiri, tidak hanya melihat siapa yang membuat dokumen pada 2022.

“Tiga saksi meninggal bukan berarti perkara otomatis berhenti,” jelasnya.

Pelapor juga menyoroti alasan yang berkaitan dengan tidak dapat dipiksanya tiga orang yang disebut memiliki keterangan penting, yakni Abd. Rahmat Tiban, Zamrud dan Ashar Yotomarungi karena telah meninggal dunia.

Pelapor mengakui penyelidik tidak mungkin meminta keterangan langsung dari orang yang telah meninggal.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak serta-merta membuktikan bahwa tidak terdapat peristiwa pidana.

Sebab, menurut pelapor, masih terdapat sejumlah sumber informasi lain yang dapat diperiksa, mulai dari dokumen tahun 2022, register dan arsip kelurahan maupun kecamatan, pejabat kelurahan dan kecamatan, Yayuk Sunarti, Imam Sutarto, data pertanahan hingga petugas BPN.

Dokumen pengembalian batas juga diminta diperoleh dan diperiksa untuk memastikan identitas objek tanah serta rangkaian peristiwa yang terjadi.

Surat beda nama diminta tidak mengaburkan pokok laporan

Dalam gelar perkara tersebut, kuasa hukum Aprisman juga meminta penyelidikan terhadap surat permo-

nonan beda nama Drs. Hi. Muhammad Tiban menjadi Abd. Rahmat Tiban tidak menggeser substansi utama laporan.

Menurut pelapor, sekalipun nantinya tidak ditemukan keterlibatan Yayuk Sunarti maupun Imam Sutarto dalam proses surat beda nama tersebut, persolan mengenai dokumen tanah yang dibuat pada Maret 2022 tetap belum terjawab.

Pertanyaan utamanya tetap mengenai kebenaran isi dokumen, dasar penerbitannya, pihak yang memberikan keterangan, serta pengetahuan pihak yang kemudian menggunakan dokumen tersebut.

Pelapor juga menyinggung fakta bahwa dokumen-dokumen 2022 tersebut disebut tidak diperlihatkan kepada kliennya ketika mediasi di Kelurahan Tatura Selatan pada Februari 2023.

Pelapor mengakui fakta tersebut tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Namun, mereka meminta hal itu dilihat sebagai bagian dari rangkaian peristiwa untuk mengetahui kapan dokumen dibuat, untuk kepentingan apa, siapa yang mengetahui keberadaannya, kapan mulai digunakan, serta apa yang diketahui pihak pengguna ketika dokumen tersebut digunakan.

Melalui Gelar Perkara Khusus, pelapor tidak meminta kepolisian langsung menetapkan para terlapor sebagai tersangka.

Permintaan pihak pelapor lebih diarahkan pada evaluasi terhadap kecukupan penyelidikan yang telah dilakukan.

Pelapor meminta agar penyelidikan dapat dibuka atau dilanjutkan apabila gelar perkara menemukan masih terdapat fakta material yang belum didalamai.

Selain itu, pelapor meminta pemeriksaan terhadap dokumen pengembalian batas SHM Nomor 10, petugas BPN yang terlibat, register Kelurahan/Kecamatan, dasar penerbitan SKPT, serta pengetahuan dan penggunaan dokumen oleh para terlapor.

“Kami tidak meminta forum hari ini menyatakan para terlapor bersalah. Kami hanya meminta agar perkara ini tidak dinyatakan bukan peristiwa pidana sebelum sumber-sumber pembuktian yang masih tersedia diperiksa secara tuntas,” urainya.

Kini, hasil Gelar Perkara Khusus Polda Sulteng menjadi titik penting untuk menentukan apakah penghentian penyelidikan tetap dipertahankan atau perkara tersebut kembali didalamai berdasarkan fakta dan alat bukti yang masih tersedia. **AMR**

Kapolres Morowali: Teladani Akhlak Rasulullah Dalam Bertugas

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor (Polres) Morowali menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Darul Muttaqien Polres Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Peringatan Maulid ini dihadiri Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini, Ketua Bhayangkari Cabang Morowali Ny. Nia Reza Khomeini, Wadanyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng AKP Sudirman, serta para pejabat utama Polres Morowali,

personel Polres Morowali dan Personel Batalyon C Satbrimob, pengurus Bhayangkari, tokoh agama, serta santri pondok pesantren Alfatтах.

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan momentum penting bagi seluruh personel Polri untuk kembali meneladani akhlak dan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas.

“Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema yang sangat agung dan sarat akan tanggung jawab bagi kita semua. Melalui momentum ini, mari kita kikis ego, hilangkan arogansi, dan kedepankan pelayanan yang berakhlak mulia,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk menjadi sosok anggota Polri yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan menjadi pribadi yang dirindukan kehadirannya oleh masyarakat.

“Jadilah polisi yang dirindukan kehadirannya oleh masyarakat karena tutur kata kita yang santun dan tindakan kita yang adil,” pesannya.

Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh peserta untuk mengambil hikmah yang kemudian diterapkan dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas kepolisian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah Maulid yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah, pembacaan doa, serta ramah tamah yang dirangkaikan dengan penilaian lomba kreatif bunga male.van

Kapolres Parmout Tanam Bawang Putih dan Salurkan Bansos di Palasa



KAPOLRES Parigi Moutong AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H bersama Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Said, S.Pd., serta bunsur Forkopimda, saat tanam bawang putih di Mako Polsek Tomini, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (19/8/2026). FOTO: DOK POLRES PARMOUT

SULTENG RAYA - Komitmen Polres Parigi Moutong (Parmout) dalam mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan terus diperkuat.

Kali ini, jajaran Polres Parigi Moutong bersama pemerintah daerah dan kelompok tani melaksanakan penanaman bawang putih, sekaligus menyalurkan bantuan sosial (bansos), alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Palasa.

Kegiatan yang berlangsung di Mako Polsek Tomini, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 10.00 wita, tersebut merupakan bagian dari gerakan penanaman bawang secara serentak di 17 provinsi yang dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H., hadir langsung bersama Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Said, S.Pd., unsur Forkopimda, jajaran pejabat utama Polres Parigi Moutong, pemerintah kecamatan dan desa, Bhayangkari, tenaga kesehatan, kelompok tani serta masyarakat.

Penanaman bawang putih kali ini dilaksanakan pada lahan seluas 99 are dengan menggunakan bibit Garlic Superior Seeds. Bibit tersebut merupakan bantuan dari Dinas TPHP Kabupaten

Parigi Moutong dan sebagian didatangkan dari Pulau Jawa.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada bawang putih di Kabupaten Parigi Moutong dengan sasaran pengembangan lahan mencapai 40 hektare.

Tidak hanya menanam, Polres Parigi Moutong juga hadir memberikan dukungan konkret kepada masyarakat. Sebanyak 50 paket bantuan sembako diserahkan kepada warga penerima manfaat.

Sementara kepada kelompok tani, disalurkan bantuan berupa 20 unit alat semprot, bibit bawang putih, 2 unit kultivator, 1 unit mesin generator dan 2 dus herbisida. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang produktivitas petani sekaligus memperkuat pengelolaan lahan pertanian secara efektif dan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan dilanjutkan dengan penanaman bibit bawang putih secara simbolis oleh jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait.

Pada saat bersamaan, jajaran Polri bersama pemerintah pusat dan daerah mengikuti Zoom Meeting penanaman bawang serentak di 17 provinsi yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi

IV DPR RI Siti Hediati Soeharto serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahnya, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penanaman, tetapi juga pendampingan kepada petani mulai dari proses produksi hingga panen dan distribusi.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H., mengatakan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata. Melalui program penanaman bawang putih ini, kami ingin ikut mendorong produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak ingin kegiatan penanaman berhenti sebagai seremoni semata. Jajaran Polri akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, penyuluh serta kelompok tani untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Yang terpenting bukan hanya bagaimana kita menanam hari ini, tetapi ba-

gaimana tanaman ini kita kawal sampai tumbuh, dipelihara, berhasil dipanen dan hasilnya memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Kapolres, pengembangan bawang putih memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pengendalian ketersediaan serta stabilitas harga pangan.

“Target 40 hektare untuk wilayah Parigi Moutong harus kita dorong bersama. Polri siap mendukung dari sisi keamanan, koordinasi dan pendampingan agar program ini berjalan optimal serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain kegiatan pertanian, masyarakat juga mendapatkan pelayanan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Kapolres berharap seluruh pihak dapat mempertahankan kolaborasi yang telah terbangun sehingga program ketahanan pangan benar-benar menghasilkan dampak nyata.

“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Polri, TNI, dinas terkait, kelompok tani dan masyarakat harus bergerak bersama. Kami berkomitmen mengawal program ini agar produktivitas meningkat, petani semakin sejahtera dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” jelasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan yang berakhir sekitar pukul 13.00 WITA tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar dengan pengamanaan personel gabungan Polres Parigi Moutong dan Polsek Tomini.

Polri untuk masyarakat mengawal ketahanan pangan, memperkuat produktivitas petani, dan menjaga stabilitas nasional. YAT

Aliansi Negeri Seribu Megalith Dorong Cudy Kembali Pimpin Sulteng

SULTENG RAYA - Aliansi Negeri Seribu Megalith menyatakan dukungan agar Rusdy Mastura atau akrab disapa Cudy kembali maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dukungan ini lahir dari kegelisahan melihat arah pembangunan Sulteng yang dinilai semakin kehilangan orientasi strategis di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung sangat cepat.

Ketua Aliansi Negeri Seribu Megalith, Azwar, mengatakan Sulawesi Tengah sedang menghadapi apa yang disebutnya sebagai krisis pembangunan. Krisis tersebut, terlihat dari semakin lemahnya posisi daerah dalam memperoleh manfaat fiskal dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, perencanaan infrastruktur yang belum sepenuhnya mengikuti kebutuhan kawasan yang berkembang, terbatasnya akses masyarakat terhadap program pemberdayaan, serta pemerintahan yang terlalu sering terjebak pada aktivitas seremonial.

“Masalah Sulteng hari ini bukan karena kita kekurangan sumber daya. Justru kita memiliki sumber daya alam, investasi, kawasan industri, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Tetapi kekuatan ekonomi itu belum dikonversikan secara optimal menjadi kekuatan pembangunan daerah,” kata Azwar.

Menurut Azwar, persoalan hilangnya hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu contoh paling nyata bagaimana posisi strategis Sulteng

dalam struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi hak fiskal dan kapasitas pembangunan daerah. Ketika kegiatan pengolahan sumber daya alam berlangsung dalam skala sangat besar di Sulteng, pemerintah daerah seharusnya memiliki kapasitas untuk memastikan manfaat fiskal dan ekonomi dari kegiatan tersebut kembali kepada masyarakat dan daerah.

Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dinilai belum selalu bergerak berdasarkan satu desain besar mengenai ke mana arah pertumbuhan ekonomi Sulteng akan dibawa. Infrastruktur semestinya tidak sekadar dibangun sebagai proyek, tetapi menjadi bagian dari sirkuit ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi, industri, pelayanan, pusat perdagangan, sentra masyarakat, dan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari arus pertumbuhan.

Masalah berikutnya adalah lemahnya akses masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi. Pertumbuhan investasi dan industri belum otomatis membuat masyarakat lokal menjadi bagian utama dari rantai nilai ekonomi baru.

Menurut Aliansi, pemerintah harus mengubah pendekatan dari sekadar memberikan bantuan men-



Azwar

jadi membangun kapasitas produktif masyarakat, sehingga petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja lokal, dan pelaku ekonomi kecil dapat masuk ke dalam rantai pasok ekonomi yang sedang tumbuh.

Azwar juga mengkritik kecenderungan pemerintahan daerah yang terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial. “Kita tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk memotong pita, menghadiri seremoni, dan membuat acara. Kita membutuhkan pemerintahan yang bekerja. Pemerintahan harus hadir untuk menyelesaikan persoalan produksi, membuka akses ekonomi, memperkuat infrastruktur, memperjuangkan hak fiskal daerah, dan meningkatkan produktivitas rakyat,” tegasnya.

Karena itu, Aliansi Negeri Seribu Megalith menilai Sulteng membutuhkan perubahan orientasi pemerintahan. Gubernur tidak cukup hanya menjadi administrator APBD, tetapi harus menjadi pengarah transformasi ekonomi daerah dan sekaligus menjadi negosiator kepentingan Sulawesi Tengah di tingkat nasional.

Dalam konteks itulah Aliansi mendorong Cudy kembali maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Dukungan ini tidak dimaksudkan sebagai nostalgia politik, melainkan sebagai tawaran untuk menghadirkan kembali kepemimpinan yang mampu membaca perubahan struktural Sulteng dan mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi daerah menjadi agenda pembangunan yang lebih terarah.

“Kami ingin pemilihan gubernur nanti menjadi perdebatan tentang masa depan Sulteng. Bukan sekadar siapa yang menang, tetapi apa yang akan dilakukan setelah menang. Bagaimana DBH diperjuangkan, bagaimana infrastruktur direncanakan, bagaimana rakyat diberdayakan, dan bagaimana pemerintahan keluar dari budaya seremonial,” ujar Azwar. Aliansi Negeri Seribu Megalith percaya bahwa Sulawesi Tengah tidak boleh hanya menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi nasional, sementara pemerintah daerah dan masyarakatnya tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengendalikan dan menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Sulteng membutuhkan pemerintahan yang bekerja, pembangunan yang terencana, fiskal daerah yang kuat, dan rakyat yang berdaya. YAT

Maulid Nabi 1448 H, Kapolda Sulteng Ajak Personel Teladani Akhlak Rasulullah

SULTENG RAYA - Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H/2026 M di Masjid Ar Rahman Poldas Sulteng, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolda Sulteng Irjen Pol Nasri dan dihadiri Ketua Bha-yangkari Daerah Poldas Sulteng Ny. Lina Nasri, Irwanda Kombes Pol Purwanto Puji Sutan, para PJU, personel Poldas Sulteng serta anak-anak panti asuhan.

Mengusung tema “Den-

gan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” peringatan tersebut menjadi momentum bagi personel untuk memperkuat nilai moral dan integritas dalam pelaksanaan tugas.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Nasri menegaskan, Maulid Nabi tidak boleh sebatas seremonial, tetapi harus menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, keberanian, kepedulian dan kasih

sayang Rasulullah SAW.

Menurutnya, kewenangan yang diberikan negara kepada Polri merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, proporsional dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut harus digunakan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara berkeadilan.

“Polri Presisi tidak hanya membutuhkan profesionalisme, modernisasi dan teknologi, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi

moral dan akhlak yang kuat. Kemampuan tanpa integritas dapat disalahgunakan, kewenangan tanpa akhlak dapat melahirkan arogansi, dan penegakan hukum tanpa keadilan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Kapolda mengajak seluruh personel menjadikan kejujuran dan integritas sebagai karakter, profesionalisme sebagai standar kerja, serta pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Ia juga mengingatkan personel



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat memberikan santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Nurul Falah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H/2026 M di Masjid Ar Rahman Poldas Sulteng, Kamis (3/9/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDAS SULTENG

menjaga kehormatan seragam, menjauhi pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, perilaku koruptif dan hedonisme.

Sementara, Hikmah Maulid disampaikan Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H. Ia mengajak peserta meneladani akhlak Rasulullah SAW serta memiliki hati yang mutmainnah, yakni tenang dan tidak larut dalam kegagalan maupun kekhawatiran menghadapi masa depan. Ia menekankan tiga hal utama, yakni keteladanan, Polri Presisi dan kemakmuran.

Kapolda berharap momentum Maulid Nabi menjadi sarana introspeksi dan peningkatan kualitas pengabdian. “Jadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman, Polri Presisi sebagai

cara kita bekerja, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT,” pesannya.

Kabidhumas Poldas Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaemin menambahkan, kegiatan dituntut dengan pemberian santunan kepada pengasuh dan anak-anak Panti Asuhan Nurul Falah sebagai bentuk kepedulian dan pemererat silaturahmi Poldas Sulteng dengan masyarakat.

Melalui momentum tersebut, Poldas Sulteng berkomitmen memperkuat karakter personel agar semakin Presisi, humanis, profesional dan dipercaya masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. YAT



Rumah Zakat Salurkan 800 Paket Makanan untuk Penyintas Gempa NTT



RUMAH Zakat mengerahkan tim melawan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi para warga terdampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). FOTO: RUMAH ZAKAT

SULTENG RAYA - Rumah Zakat mengerahkan tim melawan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi para warga terdampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Lokasi penyaluran kali ini berada titik pos pengungsian yang berada di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

Melihat kondisi darurat di lapangan, Rumah Zakat menyalurkan bantuan be-

rupa 800 paket makanan siap saji guna memenuhi kebutuhan nutrisi harian para pengungsi yang belum dapat memasak secara mandiri.

Aksi kemanusiaan ini melibatkan 10 orang personil melawan Rumah Zakat yang bekerja sama secara bahu-membahu dengan warga setempat di pos pengungsian Desa Nangahale. Keterlibatan warga lokal turut mempercepat proses pendistribusian agar bantuan dapat segera diterima

oleh para penyintas.

Salah seorang warga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Rumah Zakat dan para donatur atas bantuan yang diberikan. Ia mengatakan, sejak rumahnya tidak dapat ditempati dan keluarganya harus mengungsi, kebutuhan makanan menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan.

"Kami sekeluarga dan warga di sini sangat berterima kasih kepada Rumah Zakat dan para donatur. Sejak rumah kami tidak bisa ditinggali dan harus mengungsi, urusan makan menjadi hal yang paling kami khawatirkan. Dengan adanya bantuan 800 paket makanan siap saji ini, kami sangat terbantu karena tidak perlu bingung lagi memikirkan kebutuhan konsumsi harian di posko pengungsian," ungkap salah satu warga dengan penuh haru.RPB

PT BFI FINANCE PALU (0451-422678) Penawaran Atas Unit :	
TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT 2019 DN1914NR, TOYOTA-ALLNEWVELOZ-1.5 MT DF 2022 DM1073AW, TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT 2020 DP1353KG.	
DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT 2022 DN1537NZ, DAIHATSU-AYLA-X 1.0 AT 2016 DP1063EG.	
HONDA-VARIO-150ESPEXCLUSIVE 2019 DC276TXL.	
YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2022 DN5892DW, HONDA-GENIO-CBS 2020 DN3356DX.	
HONDA-VARIO-125FCBSISS 2022 DN- 2870MW.	
SUZUKI CARRY-FUTURA 1.5 PU WIDE DECK 2015 DN8309EA.	
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2014 DN1314CD	

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 487A IN
NAMA	: MOH, RHADYA ANUGRAH
ALAMAT	: JL. HM. SCEHARTO RT/ RW 002/003 KEL. PETOBO KEC. PALU SELATAN KOTA PALU
MERK/TYPE	: HONDA T4G02T31L0 M/T
NO RANGKA	: MH1KD1115JK051648
NO MESIN	: KD11E-1051153
NO BPKB	: P06705195S1

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 7020 AU
NAMA	: PT.TOGEAN INDAH GRUP
ALAMAT	: JL. LENJEND SOEPRAPTO NO. 28 KEL BESUSU TENGAH KEC. PALU TIMUR KOTA PALU
MERK/TYPE	: ISUZU RLV 55B LX
NO RANGKA	: MHCNLR55HKJ082239
NO MESIN	: M0082239
NO BPKB	: Q01982225S1

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 5158 OD
NAMA	: IWAN BAWINTO
ALAMAT	: JL. SUPRAPTO PALU RT/RW 002/006 KEL. TALISE KEC. MANTIKU-LORE, KOTA PALU
MERK/TYPE	: YAMAHA B6H A/T
NO RANGKA	: MH3SG6520PJ848424
NO MESIN	: G3L8E-1814589
NO BPKB	: U0166772S

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 2362 NP
NAMA	: WIWIK RIKANA
ALAMAT	: JL. YUJOKODI NO. 47 PALU RT/RW 005/002 KEL. BESUSU TENGAH KEC. PALU TIMUR KOTA PALU
MERK/TYPE	: HONDA/JACH 1M21B04 AT
NO RANGKA	: MH1JFM228EK010578
NO MESIN	: JFM2E-1992416
NO BPKB	: L04466819S1

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 1022 NA
NAMA	: PT. KARYA BARU MAKMUR
ALAMAT	: JL. GAJAH MADA NO. 61 KEL. UJUUA KEC. PALU BARAT KOTA PALU
MERK/TYPE	: TOYOTA AVANZA 1.3 G MT
NO RANGKA	: MHKMSEA3JGK007112
NO MESIN	: 1NFR08997
NO BPKB	: M12969780S1

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 1552 AF
NAMA	: BENNY TANDRA
ALAMAT	: BTN TAVANJUKA MAS BLOK KUYKEL. TAWANJUKA KEC. TATANGA KOTA PALU
MERK/TYPE	: ISUZU TBR 541 TOURING
NO RANGKA	: MHCTBR54F4K260134
NO MESIN	: E260134
NO BPKB	: D1197863

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 137ND
NAMA	: PT.KARYA BARU MAKMUR
ALAMAT	: JL. GAJAH MADA NO. 61 KEL. UJUUA KEC. PALU BARAT KOTA PALU
MERK/TYPE	: TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V AT
NO RANGKA	: MHFG88EMXHO410145
NO MESIN	: 2GD-C168905
NO BPKB	: M05152495S1

BIRO PERJALANAN UMUM
PT. MEDI SUKA LAKSANA (MSL TRAVEL)

Dapatkan Promo Menarik Tujuan : **Poso-Palu**

1. Beli tiket 10 kali dengan nama sama dalam sebulan, GRATIS 1 kali pemberangkatan
2. Diberikan Fasilitas Sarapan/Makan Pagi untuk Penumpang
3. Melayani pengiriman paket Poso-Palu dengan aman



Segera hubungi :
Agen Poso : 0812 9588 9876
Agen Palu : 0813 9688 9877

Trump Umumkan Sanksi Ekonomi Paling Mematikan Terhadap Iran

SULTENG RAYA - Presiden AS Donald Trump mengatakan AS melancarkan 'operasi ekonomi paling melumpuhkan' terhadap Iran. Hal ini ia sampaikan menyusul kegagalan negara adidaya itu melumpuhkan Iran lewat serangan militer. "AS MENJALANKAN OPERASI EKONOMI PALING MELUMPUHKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANA PUN," ujarnya dalam sebuah unggahan di Truth Social, Kamis.

AS sedianya telah berulang kali menerapkan dan menambah sanksi ekonomi pada Iran sejak revolusi Islam pada 1979. Sanksi puluhan tahun itu mematikan bagi warga Iran karena berdampak juga pada layanan dasar seperti kesehatan.

Bagaimanapun, Iran menemukan caranya bertahan dari sanksi brutal tersebut dengan memperkuat kemandirian ekonomi dan teknologi. Sejak Februari lalu, AS bersama Israel melakukan serangan besar-besaran ke Iran dengan tujuan menggulingkan rezim. Serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan ribuan warga Iran itu gagal membuat Iran takluk dan justru membahayakan sekutu AS di kawasan.

Trump sesumbar mengatakan, "Tidak ada seorangpun yang memberikan kesempatan lebih besar kepada Republik Islam Iran untuk mencapai kesepakatan selain saya."

"SAYANGNYA," bagi mereka, mereka gagal memanfaatkannya.Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan OPERASI EKONOMI PALING MELUMPUHKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANA PUN!"

Ia memperingatkan bahwa "Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ia mengulangi klaimnya bahwa "Angkatan laut mereka telah lenyap, angkatan udara mereka hancur, pabrik-pabrik militer mereka kini tinggal puing, mata uang mereka tidak bernilai, dan negara mereka berada di ujung tanduk."

"Hari ini, saya juga mengumumkan bahwa negara MANA PUN yang memberikan lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan bantuan penyelamatan apa pun kepada Iran akan menghadapi Konsekuensi Ekonomi yang SANGAT BESAR," ujarnya.

Ia menambahkan, "Penyelundupan minyak, fasilitas pertukaran mata uang (swap lines), transfer uang tunai, tempat penukaran mata uang, registrasi kapal, perusahaan boneka — Semua itu harus dihentikan SEKARANG." Ia menyatakan AS telah mencatat pi-



BILLBOARD menampilkan wajah Presiden AS Donald Trump terpampang di salah satu jalan di Teheran, Iran, Senin (27/7/2026). FOTO: EPA

hak-pihak yang melakukan transaksi dengan Iran.

"Ini akan menjadi D-Day Ekonomi," ujarnya merujuk serangan besar-besaran AS ke Pantai Normandia di Prancis pada Perang Dunia II.

Trump juga menyerukan kepada sekutu untuk berdiri bersama Amerika Serikat guna mengisolasi, dan mengalahkan, ancaman Iran. "Para orang gila ini sedang terdesak, dan LANGKAH-LANGKAH BERSEJARAH ini akan melumpuhkan mereka serta kemampuan mereka untuk menyebarkan teror ke seluruh dunia," kata Trump.

Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati,

mengatakan bahwa tidak ada satu pun dana perbankan luar negeri milik negara tersebut yang telah dikembalikan, meskipun terdapat kesepakatan pada bulan Juni dengan Amerika Serikat yang secara sementara menanggukkan sejumlah sanksi perbankan dan ekonomi.

"Sejauh ini, tidak ada dana dari aset yang dibekukan tersebut yang telah dicairkan berdasarkan ketentuan kesepakatan itu," ujar Hemmati kepada lembaga penyiaran negara Iran, IRIB.

Nota Kesepahaman bulan Juni, yang bertujuan mengakhiri ketegangan selama berbulan-bulan antara AS dan Iran, telah berakhir

masa berlakunya pada hari Senin. Hemmati juga mengatakan bahwa penurunan pendapatan dari sektor minyak dan pajak telah berdampak buruk pada perekonomian negara.

"Meskipun harapan dan tuntutan masyarakat akan perbaikan sangat dihargai dan beralasan, penurunan yang terjadi secara bersamaan pada pendapatan minyak, pendapatan pajak, dan iuran jaminan sosial telah memengaruhi seluruh sektor serta pilar perekonomian negara," ujarnya.

Menurut kantor berita Iran, Fars, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa AS ingin "menjarah negara-negara di kawasan tersebut".

"Amerika telah mendekati negara-negara Teluk Persia dan kawasan ini untuk menjarah sumber daya mereka," ujarnya dalam pertemuan dengan Presiden Irak di Baghdad, sebagaimana dilaporkan Fars.

"Iran, Irak, dan bangsa mereka yang besar telah menyadari bahwa masalah terbesar dan penyebab utama segala persoalan di kawasan ini adalah Amerika. Pihak Amerika telah kalah dalam perang ketiga yang dipaksakan, baik dari segi militer maupun politik," katanya.RPB

ASDP Kerahkan Dua Armada Tangguh Bantu Pemulihan NTT

SULTENG RAYA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus mengoptimalkan peran tersebut melalui dua armada tangguh, KMP Ile Labalekan dan KMP Ile Ape, yang dikerahkan untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascagempa di NTT. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan keduanya membawa dukungan yang berbeda sesuai kebutuhan di lapangan, namun memiliki tujuan yang sama yakni membantu mempercepat masyarakat dan wilayah terdampak untuk kembali bangkit.

"Sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan, mobilisasi personel, kendaraan, peralatan, dan bantuan penanganan bencana melalui kedua armada tersebut tidak dipungut biaya," ujar Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Heru menyampaikan dukungan ini merupakan bentuk komitmen ASDP untuk membantu memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat bergerak cepat menuju masyarakat terdampak. Heru menegaskan KMP Ile Ape diberangkatkan dari Pelabuhan Kewapante, Maumere, menuju Palue, Kabupaten Sikka.

"Kapal membawa personel

Polres Sikka, tenaga medis, kendaraan, serta alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan material akibat bencana," lanjut Heru.

Dalam situasi darurat, ucap Heru, konektivitas penyeberangan memiliki peran strategis karena memungkinkan personel, tenaga medis, peralatan, dan sumber daya bergerak menuju wilayah yang membutuhkan dukungan. ASDP, lanjut Windy, terus berkomitmen mendukung penanganan bencana di NTT melalui konektivitas penyeberangan yang kami miliki.

"Mobilisasi personel, tenaga medis, maupun alat berat menjadi bagian penting untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak," ucap Heru. Heru menjelaskan KMP Ile Ape bertolak dari Kewapante pada pukul 17.30 WITA dan tiba di Palue pada pukul 22.25 WITA. Pelayaran tersebut membawa 35 penumpang dewasa, terdiri atas anggota Polres Sikka, termasuk lima dokter, serta kendaraan dan peralatan pendukung penanganan bencana.

Heru memaparkan muatan yang dibawa meliputi enam

unit kendaraan Golongan II R-2, tiga unit kendaraan Golongan IV Barang R-4, serta dua unit alat berat excavator Golongan IX. Peralatan tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan material di wilayah terdampak bencana di Palue, Kabupaten Sikka.

Sebelumnya, KMP Ile Labalekan juga telah dikerahkan untuk mendukung mobilisasi bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.

"Kehadiran kedua armada tersebut memperkuat peran ASDP dalam memastikan kebutuhan penanganan bencana dapat bergerak melalui jalur penyeberangan," kata Heru.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menegaskan, dukungan kemanusiaan tetap dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pelayaran dan kesiapan operasional. Dalam setiap mobilisasi bantuan, ucap Windy, keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas. "KMP Ile Ape diberangkatkan setelah melalui koordinasi dengan pihak terkait dan memperoleh izin operasi dari KSOP setempat. Kondisi kapal dan seluruh crew juga dalam keadaan baik dan sehat," ujar Windy. RPB

Untuk yang berlangganan rental MOBIL LORENNa akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK 7x Keberangkatan Pals-Talis gratis 1 tiket

LORENNa
TRAVEL AGENT & EXPEDITION

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Talioli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003



Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

Biro Perjalanan Umum
CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS
PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN :

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)
Telp : 081252984112, 081252984116
081243799363, 082122150777

BIRO PERJALANAN UMUM
PRIMA JAYA TRAVEL

PALU - POSO - TENTENA
BUNGKU - KENDARI

PALU Jl. Hangtua No. 40 Telp : 082396625339	BUNGKU (MOROWALI) Jl. Trans Sulawesi (Depan RSUD Morowali) Telp.: 085394575024	KENDARI Terminal Puwatu Telp : 082342677110
--	---	--

Pemerintah Siapkan MBG 2027 Lebih Presisi dan Tepat Sasaran

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting dalam perjalanan kebijakan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelaksanaannya terus diperluas sepanjang 2026, pemerintah mulai menyiapkan pembenahan untuk memastikan MBG pada 2027 semakin presisi, bersih dalam tata kelola, efisien dalam penggunaan anggaran, serta tepat manfaat bagi masyarakat.

OLEH : RADJIMAN ARIF*)

LANGKAH ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menempatkan ketepatan data sebagai fondasi utama pembenahan MBG. BGN tengah merapikan dan mengintegrasikan sistem data lintas Kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak terdapat identitas ganda dalam daftar penerima manfaat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai institusi yang memiliki basis data pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kelompok sasaran program.

Sudaryono mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran tersebut mencakup penanganan sekitar enam juta data yang perlu dirapikan. Pembenahan menjadi penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang berhak dan tidak terganggu persoalan administrasi atau pen-

catatan yang tumpang tindih. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan sasaran dan kebutuhan program secara akurat.

Perbaikan yang dilakukan BGN juga tidak berhenti pada persoalan data penerima. Sudaryono mendorong penguatan standar operasional, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perhatian terhadap standar dapur menjadi penting karena kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat harus berjalan seiring dengan perluasan program. Ketepatan sasaran, dengan demikian, harus didukung pelayanan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya menjadi perhatian

karena kebutuhan intervensi gizi relatif besar. Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah menempatkan sumber daya pada wilayah yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat MBG tidak hanya luas, tetapi juga semakin tepat.

Pembenahan di sisi pelaksanaan kemudian berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat peluang agar kebutuhan anggaran MBG pada 2027 dapat dikelola lebih efisien. Berdasarkan perkembangan program dan langkah pembenahan yang dilakukan, ia menilai efisiensi pada pelaksanaan tahun berjalan dapat memengaruhi kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, melainkan juga efektivitas setiap rupiah yang digunakan.

Purbaya menyampaikan bahwa anggaran MBG dalam RAPBN 2027 berada di kisaran Rp240 triliun. Namun, ia membuka peluang adanya penghematan berdasarkan perkembangan pelaksanaan dan hasil pembenahan yang dilakukan BGN. Perspektif tersebut penting karena program publik berskala besar harus menjaga keseimbangan antara perluasan manfaat, kualitas pelayanan, dan disiplin fiskal. Efisiensi yang terukur juga dapat menjaga ruang fiskal untuk mendukung agenda pembangunan nasional lainnya.

Efisiensi dalam konteks MBG tidak semestinya di-

maknai sebagai pengurangan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, efisiensi menjadi instrumen untuk memastikan anggaran digunakan pada kebutuhan yang benar-benar produktif dan tepat sasaran. Ketika data penerima semakin akurat, potensi layanan ganda dapat ditekan. Ketika operasional dapur semakin terstandar, kualitas dan keamanan makanan dapat lebih terjaga. Dengan demikian, efisiensi dan kualitas seharusnya berjalan dalam satu arah.

Dimensi berikutnya adalah penguatan tata kelola dan kepercayaan publik. Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto menilai perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran MBG dapat memperkuat disiplin fiskal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem yang andal dapat membuat penyaluran program semakin tepat sasaran serta membantu menekan potensi kebocoran.

Nico juga melihat MBG memiliki dampak yang lebih luas apabila pelaksanaannya memberi perhatian kepada daerah 3T dan melibatkan kekuatan ekonomi lokal. Pelibatan UMKM, pelaku usaha, serta masyarakat di sekitar rantai penyediaan makanan dapat memperluas manfaat program. Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Perkembangan terkini menunjukkan pembenahan tata kelola terus dilakukan. BGN juga berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan melalui penguatan kapasitas pengelola administrasi dan akuntansi di SPPG. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk memastikan dana yang digunakan dalam pelaksanaan MBG dapat dikelola secara kredibel dan dipertanggungjawabkan sebagai uang rakyat.

Persiapan menuju MBG 2027 pada akhirnya memerlukan kematangan proses kebijakan pemerintah. Program besar tidak dibiarkan berjalan tanpa evaluasi, melainkan terus diperbaiki berdasarkan pengalaman pelaksanaan. Pembenahan data membuat program semakin presisi, efisiensi anggaran menjaga keberlanjutan fiskal, sedangkan penguatan tata kelola memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.

Jika konsistensi pembenahan ini terus dijaga, MBG 2027 berpeluang menjadi program yang lebih matang. Pemerintah telah menunjukkan bahwa perluasan manfaat harus berjalan bersama akurasi data, keamanan pelayanan, disiplin anggaran, dan akuntabilitas. Dengan fondasi tersebut, MBG dapat membuktikan kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun kebijakan publik yang lebih presisi, bersih, dan tepat manfaat. *) Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

TAJUK



Menjinakkan Bayang-Bayang Megathrust

BAYANG-bayang kekhawatiran kembali memayungi ruang publik Palu dan Sulawesi Tengah seiring mencuatnya isu potensi gempa megathrust. Di kawasan yang menyimpan luka mendalam akibat tragedi kelim 2018 berupa kombinasi gempa, tsunami, dan likuefaksi yang merenggut ribuan nyawa, kembali munculnya istilah geologi ini wajar jika memicu kejut trauma kolektif. Namun, membiarkan wacana kebencanaan bereskalasi menjadi kepanikan massal tanpa basis edukasi yang jernih justru akan menciptakan ancaman baru: kelumpuhan sosial dan psikologis yang sama merusaknya dengan bencana fisik itu sendiri.

Pernyataan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu, Djati Cipto Kuncoro, hadir sebagai penawar yang tak hanya menenangkan, tetapi juga berdiri di atas pijakan ilmiah yang kokoh. Penjelasanannya memberikan perspektif baru atas dinamika geofisika di kawasan tersebut. Rentetan gempa berskala kecil yang kerap mengguncang Palu, Sigi, dan sekitarnya diartikan sebagai proses pelepasan energi tektonik secara pelepasan berkala (gradual energy release).

Secara teoritis, dinamika ini mencegah terjadinya pelepasan energi dalam skala amat dahsyat sekaligus. Catatan BMKG mengenai 3.596 kejadian gempa di Kabupaten Sigi dan sekitarnya sepanjang periode 2021 hingga 2026 seyogianya tidak dipandang semata sebagai ancaman kemalangan, melainkan petunjuk bahwa bumi tempat kita berdiri memang berdenyut dan dinamis.

Realitas geofisika ini menyodorkan dua landasan mendasar yang wajib dipahami publik dan pemangku kebijakan. Pertama, hingga saat ini belum ada teknologi atau sains yang mampu memprediksi tanggal, jam, dan menit terjadinya gempa bumi secara akurat. Kedua, posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada di atas persimpangan sesar aktif dan zona subduksi adalah ketetapan alam yang tak mungkin diubah atau dihindari.

Atas dasar itulah, cara pandang kita terhadap isu megathrust harus ditransformasikan secara mendasar: dari narasi ketakutan yang menggentingkan yang melumpuhkan menjadi ruang edukasi serta mitigasi yang memberdayakan. Menghadapi potensi bencana tak bisa dilakukan dengan penyangkalan (denial), melainkan dengan kesiapsiagaan mandiri berbasis sains. Di titik inilah pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, dan aparat terkait memikul tanggung jawab moral yang besar. Literasi bencana harus disalurkan secara berkala, transparan, dan terukur agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh disinformasi dan rumor liar yang berkembang di media sosial.

Langkah mitigasi tidak boleh hanya berhenti pada imbauan di atas kertas, melainkan harus terintegrasi penuh dalam struktur kehidupan sehari-hari. Penegakan aturan tata ruang yang berbasis peta kerawanan bencana, penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa secara ketat, hingga pelatihan evakuasi mandiri yang digelar secara rutin di tingkat RT, sekolah, dan perkantoran harus menjadi budaya baru. Kesiapsiagaan institusional yang berpadu dengan ketahanan masyarakat adalah benteng paling efektif untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian material.

Bumi Sulawesi Tengah memang akan terus bergerak dan mencari keseimbangannya. Kita tidak bisa menghentikan pergeseran lempeng tektonik, namun kita memegang kendali penuh atas cara kita meresponsnya. Ketangguhan warga dalam menyerap informasi berbasis fakta, serta kedisiplinan dalam menjalankan mitigasi, adalah modal utama untuk keluar dari bayang-bayang ketakutan dan membuka masa depan yang lebih siap menghadapi bencana. **

Api yang Belum Dijawab RUU Kehutanan

KEBAKARAN hutan kembali menjadi berita pada 2026. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 107.465 hektare (Ha) hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juni. Sebanyak 54 persen berada di kawasan hutan. Memasuki Agustus, titik panas kembali meningkat di sejumlah wilayah dan operasi pemadaman diperkuat.

OLEH : RISMUNANDAR

KITA mengenal betul pola sesudahnya. Manggala Agni bergerak, tim gabungan turun, water bombing dilakukan jika diperlukan, lalu penegakan hukum mengejar siapa yang bertanggung jawab. Negara sebenarnya tidak kekurangan pengalaman menghadapi api.

Yang mengusik saya justru hal lain. Pada saat kebakaran kembali terjadi, DPR sedang memproses perubahan keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil harmonisasinya telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) pada 20 Juli 2026 dan RUU ini sedang bergerak menuju pembahasan bersama Pemerintah.

MOMENTUM KEDUANYA SEHARUSNYA BERTEMU.

Saya membaca draf RUU hasil harmonisasi dengan satu pertanyaan: Setelah lebih dari seperempat abad, apakah cara hukum kehutanan kita menghadapi kebakaran juga sedang diperbarui?

JAWABANNYA BELUM MEYAKINKAN.

Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Agustus lalu ditangani Manggala Agni bersama Balai Besar TNBTS, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat. Kerja bersama seperti ini tentu diperlukan. Tidak masuk akal berharap satu institusi menghadapi kebakaran besar sendirian.

TETAPI KASUS ITU JUGA MEMPERLIHATKAN SESUATU YANG JARANG DIBICARAKAN.

Pengelolaan kawasan konservasi berada dalam struktur konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sementara fungsi khusus pengendalian kebakaran hutan, termasuk Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Manggala Agni, berada dalam struktur Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Pembagian fungsi tersebut tidak otomatis bermasalah. Yang perlu diuji adalah apakah ia membuat kemampuan respons cukup dekat dengan kawasan ketika api pertama kali muncul.

SEBAB API TIDAK TERLALU PEDULI PADA BAGAN ORGANISASI.

Di taman nasional, persoalannya bahkan lebih rumit. Ada habitat yang harus dilindungi, medan sulit, sumber air terbatas, masyarakat sekitar kawasan, aktivitas wisata, dan pengunjung yang juga harus diselamatkan. Kesiapsiagaan di kawasan semacam itu tidak semestinya baru dibicarakan ketika asap sudah terlihat.

DI SINILAH RUU KEHUTANAN MASIH MEMUNYAI RUANG UNTUK DIPERKUAT.

Pasal 65A jangan berhenti menjadikan kebakaran sebagai data. Data itu harus menjadi dasar penentuan risiko kawasan. Dari sana pemerintah dapat menetapkan standar kesiapsiagaan yang berbeda sesuai karakter kawasan: kebutuhan personel, sarana pemadaman, jalur evakuasi, sistem komunikasi, akses air, sampai kemampuan memperoleh dukungan udara.

Pasal 58A juga membuka ruang yang menarik. Pendanaan penyelenggaraan kehutanan tidak harus dibaca sebagai kewajiban APBN dan APBD semata. Terutama pada kawasan konservasi yang sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

SAYA KIRA KITA PERLU MULAI BERANI MEMBICARAKAN INI.

Negara tidak boleh menyerahkan otoritas konservasi kepada swasta. Zonasi, perlindungan biodiversitas, pengawasan, dan penegakan hukum harus tetap menjadi tanggung jawab negara. Tetapi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan tidak seharusnya hanya menikmati pendapatan sementara seluruh biaya risiko ditanggung publik.

Ada pelajaran sederhana dari Kanada. Parks Canada pada 2026 mengontrak operator helikopter swasta untuk mendukung pengelolaan kebakaran di kawasan hutan perlu ikut dievaluasi. RUU perlu memberi mandat yang lebih jelas tentang kesiapsiagaan berbasis risiko, pembagian tanggung jawab antarpengelola, serta pembiayaan pencegahan dan tanggap darurat. Penulis merupakan Mahasiswa Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University *Jawa Pos

TAG TRIMEDIA GROUP PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)	WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI	PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irawan.
		REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Iwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T. DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

BRI: Penyaluran Kredit Capai Rp1.646 Triliun



DIRUT BRI, Hery Gunardi. FOTO. DOK. BRI

SULTENG RAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat pertumbuhan kredit yang kuat hingga akhir triwulan II 2026. Penyaluran kredit mencapai Rp1.646 triliun, tumbuh 16,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp1.417 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut membuat laju penyaluran kredit BRI lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat sebesar 12,7% yoy.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan II 2026 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Senin (31/8). Dirut Hery mengatakan, pertumbuhan

kredit mencerminkan intermediasi BRI yang tetap solid dalam menggerakkan ekonomi nasional. Capaian tersebut juga menunjukkan hasil dari agenda transformasi yang secara konsisten dijalankan.

“Berbagai agenda transformasi BRI bukan hanya rencana strategis ke depan, melainkan juga sudah kami eksekusi dan menunjukkan hasil yang positif terhadap kinerja BRI. Bisnis tumbuh semakin kuat, intermediasi meningkat, rasio kredit bermasalah menurun dan pada saat yang sama pertumbuhan tersebut mampu kami konversikan menjadi peningkatan profitabilitas,” ujar Hery.

Pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong pertumbuhan aset BRI yang

mencapai Rp2.352 triliun, tumbuh 11,7% yoy. Sementara itu, kemampuan BRI untuk menyalurkan kredit ditopang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp1.581 triliun, meningkat 6,7% yoy dibandingkan Rp1.482 triliun pada akhir Triwulan II 2025. Pertumbuhan DPK tersebut diikuti perbaikan struktur funding, tercermin dari rasio CASA yang meningkat dari 65,5% menjadi 67,6% pada periode yang sama.

Di tengah ekspansi kredit yang terus berjalan, BRI tetap menjaga kualitas pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) membaik dari 3,0% pada Triwulan I 2026 menjadi 2,9% pada Triwulan II 2026. Perbaikan tersebut

juga diikuti penurunan Cost of Credit dari 3,4% menjadi 3,1%, atau membaik sekitar 30 basis poin.

Hery mengatakan BRI tidak hanya mengejar pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan ekspansi terse-

but menghasilkan kualitas aset dan profitabilitas yang berkelanjutan.

“Growth is back, strong. Kualitas pertumbuhan dari sisi risiko tetap kami jaga dan kami optimistis ke depan,” ujar Hery.

Dengan fundamental yang kuat dan arah transformasi yang semakin jelas, BRI optimistis dapat terus melanjutkan momentum positif ini ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik,

serta menjaga keseimbangan antara growth, profitability, dan sustainability, sehingga BRI dapat terus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian Indonesia. RHT

Kalla Toyota Tebar Promo Bunga Spesial 0%



ILUSTRASI. FOTO. DOK. KALLA TOYOTA

SULTENG RAYA - Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan Toyota impiannya, Kalla Toyota kembali menghadirkan berbagai penawaran menarik dan program pembiayaan yang kompetitif.

Namun ada yang berbeda dari penawaran di bulan September ini, karena promo ini hanya berlangsung selama 19 hari saja, mulai dari tanggal 2 hingga 20 September 2026 di seluruh cabang Kalla Toyota.

Melalui program ini, pelanggan berkesempatan menikmati kemudahan kepemilikan mobil baru dengan potongan suku bunga yang kompetitif hingga bunga 0%. Penawaran khusus ini berlaku untuk berbagai pilihan unit andalan Toyota,

seperti Toyota Agya, Calya, Avanza, Rush, Raize, hingga seluruh unit Toyota Hybrid.

Selain keuntungan suku bunga dan cicilan ringan, pembelian unit kendaraan selama periode promo ini juga didukung oleh layanan perawatan purnajual komprehensif seperti program T CARE serta jaringan mitra pembiayaan terpercaya seperti TAF (Toyota Astra Finance), Astra Credit Company (ACC) dan Mandiri Utama Finance (MUF).

“Tentunya kami terus berusaha untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin memiliki Toyota impian dengan berbagai penawaran menarik,” ujar Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin dalam keterangan tertulis yang diterima Paluinsight.id, Rabu malam (2/9).

Adapun program-program menarik lainnya

yang ditawarkan di bulan September ini adalah Bebas Bayar DP 2x dengan paket program Smart Upgrade 2.0, Bebas Tukar Tambah dari Semua Merek dengan tambahan diskon hingga 5 Juta Rupiah, Gratis Angsuran hingga 5x, hingga Bebas Asuransi hingga 2 Tahun.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar

Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kalloyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me. Dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor 04113000103 atau live chat via WhatsApp di nomor 08114414030. RHT

Bitcoin Menguat, Pasar Kripto Kembali Bergairah

SULTENG RAYA - Pasar kripto kembali menunjukkan peningkatan aktivitas pada Agustus 2026 seiring penguatan sejumlah aset digital utama. Nilai transaksi aset kripto di Indodax selama Agustus tercatat Rp8,7 triliun, naik sekitar 16 persen dibandingkan Juli yang sebesar Rp7,5 triliun.

Kenaikan aktivitas perdagangan tersebut terjadi di tengah penguatan harga sejumlah aset kripto. Berdasarkan data CoinMarketCap, Bitcoin menguat 24,36 persen dalam satu bulan, disusul Ethereum 32,01 persen, XRP 28,22 persen, Solana 41,33 persen, dan Hyperliquid (HYPE) 61,53 persen.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menilai peningkatan volume transaksi pada Agustus menunjukkan aktivitas investor mulai kembali meningkat setelah pasar bergerak landai pada bulan sebelumnya.

“Peningkatan volume transaksi di Agustus menunjukkan aktivitas pasar mulai kembali menguat. Momentum Bitcoin ikut mendorong perhatian investor, sementara bertambahnya jumlah investor menunjukkan bahwa minat terhadap aset kripto masih terjaga,” katanya.

Secara nasional, nilai transaksi kripto pada Juli 2026 mencapai Rp20,52 triliun, dengan jumlah konsumen aset keuangan digital mencapai 22,93 juta di seluruh

Indonesia. Data tersebut menunjukkan besarnya basis pengguna aset digital di tengah pergerakan harga yang kembali menguat.

Aloysia mengatakan, penguatan sejumlah aset kripto menunjukkan peningkatan sentimen pasar mulai meluas, tidak hanya terpusat pada Bitcoin.

“Bitcoin masih memiliki peran besar dalam membentuk sentimen dan aktivitas pasar. Ketika aktivitas Bitcoin meningkat, perhatian terhadap aset kripto lainnya juga dapat ikut menguat. Namun, setiap aset memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda,” ujar Aloysia.

Aktivitas perdagangan pada Agustus juga berlangsung seiring membaiknya sentimen pasar global. Namun, pergerakan aset kripto tetap dipengaruhi kondisi likuiditas dan arah kebijakan moneter global.

“Membaiknya sentimen global ikut mendorong aktivitas pasar, tetapi kondisi tersebut tetap dapat berubah seiring perkembangan kebijakan makroekonomi global dan likuiditas,” katanya.

Aloysia mengingatkan, peningkatan transaksi tetap perlu disikapi secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi masing-masing investor. Pergerakan harga jangka pendek juga tidak menjadi satu-satunya faktor dalam pengambilan keputusan investasi aset kripto. RHT



ILUSTRASI Bitcoin. FOTO. IST

RAPBN 2027 Targetkan hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru

SULTENG RAYA - Pemerintah dan DPR RI menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Dari target tersebut, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditetapkan sebesar 40,81 persen.

Target itu menjadi bagian dari sasaran pembangunan yang disepakati Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2027, Rabu (2/9/2026). Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 4,30-4,87 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penciptaan tenaga kerja formal menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah diarahkan memperkuat produktivitas, investasi, hilirisasi, dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah akan mengupayakan berbagai agenda transformasi ekonomi nasional, antara lain upaya peningkatan produktivitas, penguatan investasi, penurunan ICOR, hilirisasi, serta industrialisasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif yang ditujukan untuk penciptaan tenaga kerja formal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Misbakhun.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Untuk menopangnya, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ditargetkan tumbuh 7 persen.

Konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh 5,4 persen dan konsumsi peme-

rintah 5,6 persen. Sementara itu, ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh 7,5 persen dan impor 8,7 persen.

Dari sisi produksi, pemerintah menyiapkan target pertumbuhan pada sejumlah sektor. Sektor jasa lainnya ditargetkan tumbuh 11,1 persen, menjadi yang tertinggi. Berikutnya, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,4 persen, transportasi dan pergudangan 8,9 persen, serta informasi dan komunikasi 8,1 persen.

Industri pengolahan ditargetkan tumbuh 6,1 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor 6,5 persen, konstruksi 5,6 persen, dan pertanian, kehutanan, serta perikanan 5,4 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai bersama DPR dalam penyusunan RAPBN 2027. “Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menggunakan hasil pembahasan tersebut dalam penyempurnaan kebijakan RAPBN 2027. “Pemerintah akan menindaklanjuti dan mempertajam seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai hari ini untuk penyempurnaan kebijakan dalam pen-



MUKHAMAD MISBAKHUN

yunusan arsitektur RAPBN 2027,” katanya.

Selain penciptaan lapangan kerja, pemerintah dan DPR menetapkan sejumlah sasaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6-6,5 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen. Rasio

Gini ditargetkan sebesar 0,360-0,365.

GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.800-5.840 dolar AS atau sekitar Rp 98,54 juta-Rp 99,22 juta. Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,838, Nilai Tukar Petani 126-128, dan Nilai Tukar Nelayan 106-110. RHT



GUBERBUR dari halaman

Badan pengelola tersebut nantinya bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs geopark secara terpadu. Jika berjalan dengan baik selama kurang lebih satu

tahun, proses tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan untuk menuju Geopark Nasional.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan adalah ada-

nya kekhawatiran bahwa geopark akan membuat aktivitas masyarakat di sekitar Danau Poso menjadi sangat terbatas, sebagaimana persepsi masyarakat terhadap kawasan taman

nasional.

Kekhawatiran tersebut dinilai perlu diluruskan melalui dialog dan kajian bersama. Sebab, prinsip geopark bukan semata-mata membata-

si aktivitas masyarakat, tetapi bagaimana menjaga kawasan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Kalau geopark dibuat masyarakat menjadi lebih baik, saya kira tidak ada yang bisa menolak untuk itu,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam pertemuan.

Aktivitas masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun juga dinilai tidak semestinya langsung dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang. Pembatasan terutama diarahkan terhadap aktivitas yang memang merusak lingkungan.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dinilai penting. Bahkan, terdapat gagasan untuk memperkuat kembali nilai-nilai adat melalui musyawarah adat dan aturan adat yang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan.

Nilai-nilai kearifan lokal tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan pengembangan geopark, dengan prinsip bahwa masyarakat menjaga alam dan alam memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut juga dijelaskan bahwa geopark tidak hanya berbicara mengenai bentang alam atau geologi. Ada tiga unsur penting yang harus berjalan bersama, yakni geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.

Geodiversity berkaitan dengan upaya menjaga keragaman geologi agar tidak rusak, sekaligus mengembangkannya menjadi potensi ekonomi berkelanjutan.

Sementara biodiversity berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang keberadaannya tidak terlepas dari kondisi geologi suatu kawasan. Keragaman geologi dan hayati tersebut kemudian turut membentuk keragaman budaya masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Karena itu, geopark dinilai dapat menjadi instrumen untuk menjaga hubungan antara alam, masyarakat, dan kebudayaan.

Sejumlah contoh geo-

park di Indonesia juga disebutkan sebagai pembandingan, termasuk kawasan Maros yang dinilai telah menunjukkan bagaimana pengembangan ekonomi dapat tumbuh tanpa harus mengorbankan kelestarian alam.

Geopark Matano juga menjadi salah satu contoh yang dibahas. Kawasan tersebut disebut telah mengalami perkembangan karena adanya dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Selain aspek konservasi, Danau Poso juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat besar.

Dalam pertemuan tersebut, Danau Poso disebut bukan sekadar memiliki keindahan alam, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Sulawesi.

Salah satu kontribusinya adalah dalam sistem kelistrikan di Sulawesi. Karena itu, keberadaan dan kelestarian Danau Poso dinilai tidak hanya menjadi kepentingan Kabupaten Poso, tetapi juga memiliki arti penting bagi Sulawesi Tengah dan Sulawesi secara lebih luas.

“Danau Poso ini semuanya adalah kehidupan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi,” ungkap salah satu peserta audiensi.

Potensi lainnya adalah sidat Danau Poso. Sidat memiliki siklus hidup yang menghubungkan laut, muara, sungai, dan danau. Sidat tumbuh besar di perairan darat sebelum kembali ke laut untuk berkembang biak.

Potensi tersebut dinilai perlu dijaga sekaligus dikembangkan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Poso. Bahkan, muncul gagasan agar pengembangan budidaya sidat dilakukan di daerah asalnya sehingga nilai ekonomi dari komoditas tersebut tidak seluruhnya mengalir keluar daerah.

Para peserta audiensi juga menyampaikan bahwa upaya pengembangan geopark telah melalui proses yang cukup panjang. Tim ahli bahkan telah terlibat sejak 26 Maret 2021.

Karena itu, momentum

pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dinilai menjadi kesempatan baik untuk kembali menghidupkan proses yang telah berjalan.

Informasi dan pengalaman dari UNESCO mengenai geopark yang telah berhasil di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada Pemerintah Kabupaten Poso.

Gubernur Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan agar seluruh kekhawatiran dapat dibahas secara terbuka.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark.

Menurutnya, pelestarian Danau Poso menjadi penting karena ekosistem danau di berbagai belahan dunia terus menghadapi tekanan. Jika ekosistem danau rusak, maka akan berdampak terhadap kehidupan yang bergantung di dalamnya.

“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegasnya.

Selain mendorong percepatan geopark, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah.

Disebutkan bahwa Danau Poso telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah. Selanjutnya, telah diusulkan kepada pemerintah pusat agar Danau Poso juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Dengan status tersebut, diharapkan pemerintah pusat dapat turut memberikan dukungan, termasuk melalui pembiayaan APBN.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya akan memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi geopark dan upaya perlindungan Danau Poso.

“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya. ^{WAN}

RAPBN dari halaman

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Safri, jangan sampai hanya terlihat pada angka investasi dan produksi. Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk mengimbangi beban pembangunan yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi tersebut.

“Jangan sampai ekonominya tumbuh tinggi, industrinya berkembang pesat, penerimaan negara meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tertinggal. Beban pembangunan di daerah terus bertambah, sementara ruang fiskalnya terbatas,” ujarnya.

APBN BESAR, RUANG FISKAL DAERAH JANGAN TERBATAS

Safri meminta pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berfokus pada angka makro seperti pertumbuhan ekonomi, belanja negara dan total Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan formulasi transfer ke daerah mampu menjawab perbedaan kontribusi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar APBN secara nasional, tetapi berapa besar ruang fiskal yang benar-benar tersedia bagi daerah untuk membangun,” katanya.

Ia mengingatkan, daerah seperti Sulawesi Tengah membutuhkan anggaran yang memadai karena pertumbuhan ekonomi juga membawa konsekuensi terhadap infrastruktur, pendi-

dikan, kesehatan, lingkungan dan pelayanan publik.

“Kalau dana yang diterima daerah lebih banyak habis untuk belanja rutin dan pelayanan dasar, sementara kebutuhan infrastrukturnya terus meningkat, tentu ada persoalan yang harus dibenahi,” tegasnya.

HAK DBH SULTENG JANGAN DILUPAKAN

Safri juga mengingatkan agar pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai peningkatan anggaran, tetapi juga penyelesaian kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah.

Ia menyoroti masih adanya kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024 yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp523,7 miliar.

Menurut Safri, persoalan kurang salur tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Bagi daerah, dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan membiayai pembangunan.

“Jangan hanya bicara optimisme RAPBN 2027, sementara hak daerah yang sebelumnya belum tersalurkan masih menjadi persoalan. Bagi daerah, dana yang belum masuk itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menyangkut kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Safri menilai penyelesaian kurang salur DBH justru dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah.

“Kalau hak daerah disele-

saikan, pemerintah daerah punya ruang lebih besar untuk bergerak. Infrastruktur bisa diperkuat, pelayanan publik ditingkatkan dan program pembangunan bisa berjalan. Jadi jangan hanya melihat anggaran tahun depan, tetapi kewajiban yang belum dituntaskan juga harus diselesaikan,” katanya.

HILIRISASI HARUS MEMPERKUAT DAERAH

Selain DBH, Safri menilai kebijakan hilirisasi juga perlu dilihat dari sisi keadilan fiskal.

Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, nilai produksi atau ekspor. Pemerintah juga harus memastikan daerah tempat aktivitas industri berlangsung memperoleh manfaat yang sebanding.

“Sulawesi Tengah bukan hanya tempat bahan mentah diambil. Di sini ada proses pengolahan, kawasan industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi dengan skala sangat besar. Karena itu, harus ada desain kebijakan fiskal yang membuat masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh manfaat yang lebih sebanding,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi daerah yang menjadi basis sumber daya alam dan kawasan hilirisasi.

“Kalau daerah menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka kapasitas fiskalnya juga harus

diperkuat. Jangan sampai daerah menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang muncul akibat pertumbuhan tersebut,” ujarnya.

UKURAN AKHIRNYA ADALAH MANFAAT BAGI MASYARAKAT

Safri menegaskan dirinya tidak mempersoalkan semangat pemerintah menghadirkan RAPBN yang optimistis dan ekspansif. Namun, kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Optimisme itu penting. Tetapi bagi kami di daerah, ukuran akhirnya adalah manfaat. Apakah jalan dibangun, sekolah diperbaiki, rumah sakit diperkuat, pelayanan publik meningkat dan masyarakat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi,” kata Safri.

Ia menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik dan perjuangan kepentingan daerah, bukan ditujukan kepada individu tertentu, termasuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

“Kami tentu menghargai setiap perjuangan anggota DPR RI Dapil Sulteng. Tetapi sebagai bagian dari kontrol publik dan aspirasi daerah, kita harus terus mengingatkan bahwa Sulteng membutuhkan kebijakan fiskal yang semakin adil. Ini bukan soal siapa yang berbicara, tetapi bagaimana kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sulteng,” pungkasnya. ^{WAN}

PERTAMINA dari halaman

dalam mendukung pelayanan avtur bagi penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran manajemen melakukan diskusi sekaligus peninjauan langsung ke area operasional AFT Hasanuddin, termasuk sarana dan fasilitas pendukung serta proses Quality Control (QC). Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan aset dan operasional sekaligus mengidentifikasi ruang penguatan yang dapat mendukung keandalan layanan avtur.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Manajemen PT Pertamina (Persero), Subholding Downstream, serta fungsi Asset Management dan Procurement. Hadir di antaranya Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto, Direktur Penunjang Bisnis Subholding Downstream Putut Andriatno, serta jajaran manajemen terkait.

Melalui MWT, manajemen memberikan sejumlah arahan dan masukan terkait pengelolaan fasilitas, keandalan peralatan, standardisasi aset, serta kesiapan sarana pendukung operasional. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi

dan tindak lanjut bersama fungsi terkait.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto, mengatakan peninjauan langsung ke lapangan penting untuk memastikan aset dan fasilitas yang mendukung operasional avtur dikelola secara optimal.

“Kami ingin memastikan fasilitas dan aset yang mendukung operasional avtur memiliki keandalan yang baik dan dikelola dengan standar yang konsisten. Peninjauan langsung juga menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan di lapangan, memberikan arahan, sekaligus memastikan ruang perbaikan dapat segera ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Erry.

Erry menambahkan, keandalan fasilitas perlu berjalan beriringan dengan penerapan aspek keselamatan dan kualitas dalam setiap proses operasional.

“Keselamatan dan kualitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keandalan operasional. Karena itu, pengelolaan aset, kesiapan fasilitas, dan kompetensi personel perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada pelanggan dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan,”

tambahnya.

Sementara itu, Aviation Fuel Terminal Manager Hasanuddin, Andreas Yanuar Arinawan, mengatakan peninjauan manajemen menjadi penguatan bagi seluruh tim AFT Hasanuddin untuk terus menjaga kesiapan operasional.

“Kunjungan dan arahan dari manajemen menjadi motivasi bagi kami untuk terus memastikan seluruh sarana, fasilitas, dan proses operasional berada dalam kondisi yang andal. Setiap masukan yang diberikan akan kami tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja AFT Hasanuddin,” kata Andreas.

Menurut Andreas, keandalan layanan avtur dibangun melalui kesiapan berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari fasilitas, kualitas produk, proses operasional, hingga kesiapan personel.

“Bagi kami, keandalan pasokan avtur dan keselamatan operasional merupakan prioritas. Seluruh proses, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengendalian kualitas hingga pelayanan kepada pelanggan, terus kami jalankan sesuai standar dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

AFT Hasanuddin memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan avtur bagi operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang menjadi salah satu simpul konektivitas udara utama di kawasan Indonesia Timur. Keandalan pelayanan avtur turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan perhatian manajemen terhadap AFT Hasanuddin merupakan bagian dari upaya memastikan layanan energi bagi sektor penerbangan terus memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Bagi pelanggan, keandalan pasokan avtur menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan. Karena itu, Pertamina terus memastikan kesiapan fasilitas, kualitas produk, keselamatan, dan proses pelayanan berjalan secara konsisten agar kebutuhan pelanggan dapat dilayani secara optimal,” ujar Lilik. ^{WAN}

sejuk, ruang VIP, café, toilet umum, dan navigasi menggunakan AVIS.

“AVIS merupakan sistem panduan navigasi berbasis visual dan suara untuk membantu pilot, khususnya saat melakukan pendaratan atau navigasi taktis. Konektivitas ini memiliki arti lebih luas bagi Morowali dan Sulawesi Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah,” tandas Dedy. ^{WAN}

PEMKAB dari halaman

Kepala Bappelitbangda Irwan. Pemkab memaparkan kondisi geografis serta kebutuhan fasilitas kesehatan yang tersebar hingga wilayah pelosok.

Parigi Moutong saat ini memiliki tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yakni RSUD Anuntaloko di ibu kota kabupaten, RSUD Raja Tombolotutu di Kecamatan Tinombo yang berjarak sekitar 167 kilometer, dan RSUD Buluye Napoe di Kecamatan Moutong dengan jarak sekitar 296 kilometer. Selain itu, terdapat 24 Puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan.

Pembkab Parigi Moutong mengusulkan sejumlah program prioritas melalui Dinas Kesehatan, di antaranya pembangunan tujuh gedung Puskesmas baru, 18 Pustu, pengadaan 18 unit ambulans, enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 21 unit water treatment plant, tujuh sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.

Untuk RSUD Anuntaloko, Pemkab mengusulkan penguatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA). Usulan lainnya meliputi rehabilitasi

gedung bersalin dan nifas, pengadaan ambulans, gen-set, serta alat kesehatan.

Sementara itu, RSUD Raja Tombolotutu diusulkan mendapat pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD), rehabilitasi ruang operasi dan IGD, penambahan poli rawat jalan, serta pemenuhan alat kesehatan. Usulan tersebut berkaitan dengan tingginya angka rujukan pasien dan kondisi alat kesehatan yang rentan mengalami korosi karena berada di kawasan pesisir.

Adapun untuk RSUD Buluye Napoe, Pemkab mengusulkan pembangunan sejumlah fasilitas, mulai dari gedung rawat inap, UTD, ruang operasi, laboratorium, IGD, radiologi, gizi, laundry, pemulasaran jenazah, hingga rumah dinas atau rusunawa bagi staf. Pemkab juga mengusulkan pengadaan ambulans dan alat kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang didampingi jajaran Dirjen, Sekjen dan Biro Perencanaan Kemenkes menyambut baik usulan Pemkab Parigi Moutong tersebut.

Kemenkes menyatakan akan mendukung pemenuhan alat kesehatan dan rehabilitasi fasili-

tas kesehatan, termasuk penyesuaian standar alat kesehatan di tiga RSUD serta rehabilitasi gedung RSUD dan Puskesmas yang belum memenuhi standar.

Selain itu, Kemenkes akan memilih salah satu dari tiga RSUD di Parigi Moutong yang dinilai memenuhi kriteria untuk ditingkatkan kualitasnya menuju rumah sakit berstandar nasional.

Dukungan lainnya berupa pembangunan rumah dinas bagi tenaga kesehatan di RSUD dan Puskesmas, serta pembangunan rumah susun (rusun) tenaga medis di RSUD Buluye Napoe.

Kemenkes juga membuka peluang pembiayaan pendidikan bagi putra-putri berprestasi asal Parigi Moutong untuk menempuh pendidikan kedokteran umum, kedokteran gigi hingga dokter spesialis pada universitas yang direkomendasikan Kemenkes.

Pembkab Parigi Moutong berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan jarak antarfasilitas kesehatan yang cukup jauh. ^{AP}



Selvi Gibran Sapa Warga Huntap Talise



ISTRI Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming, di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Talise, Kota Palu, pada Rabu (2/9/2026). **FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU**

SULTENG RAYA – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyambut kedatangan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming, di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Talise, Kota Palu, pada Rabu (2/9/2026).

Kedatangan Selvi Gibran Rakabuming tersebut dalam rangka menyapa secara langsung masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi Hunian Tangguh: Berbagi, Belajar, dan Beraksi untuk Lingkungan.

Kegiatan tersebut mengungkap semangat bahwa hunian yang tangguh harus dimulai dari lingkungan yang terjaga melalui kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta merawat hunian dan lingkungan tempat tinggal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Kota Palu, Diah Puspita, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Bahasoan, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Selvi Gibran Rakabuming berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi sumber permasalahan bagi masyarakat, melainkan dapat dikelola dengan baik sehingga mem-

berikan manfaat dan nilai tambah.

Menurut Selvi, pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.

Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan serta membiasakan diri memilah sampah menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan.

Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Dengan sampah yang telah dipilah, pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih optimal, bahkan dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis. “Harapannya, sampah tidak menjadi sumber masalah. Ke depan, kita bisa mengelola sampah dengan lebih baik lagi dan memberikan nilai. Hal tersebut harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga,” ungkap Selvi.

Selvi mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pemilahan berdasarkan jenisnya.

Dengan langkah tersebut, sampah diharapkan tidak hanya berakhir sebagai limbah, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai serta mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.

Kehadiran Selvi Gibran Rakabuming di Huntap Talise menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus membangun lingkungan hunian yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dan masyarakat. **ABS**

Tingkatkan Kompetensi Lulusan, FISIP Unismuh Palu Perkuat Kurikulum Berbasis OBE

SULTENG RAYA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu terus memperkuat kualitas akademiknya melalui lokakarya pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), Kamis (3/9/2026).

Lokakarya tersebut dibuka Wakil Rektor I Unismuh Palu, Dr. Sudirman, S.KM., M.Kes., dan dihadiri unsur pimpinan fakultas, program studi, dosen, alumni, stakeholders, serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Sudirman menegaskan bahwa penerapan kurikulum berbasis OBE merupakan langkah strategis bagi perguruan tinggi dalam memastikan proses pendidikan benar-benar berorientasi pada hasil dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diukur dari terselesaikannya proses perkuliahan dan beban studi mahasiswa. Lebih dari itu, lulusan harus memiliki kemampuan yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tuntutan dunia kerja.

“OBE mengharuskan kita memastikan bahwa proses pembelajaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi, yang menjadi ukuran bukan hanya apa yang diajarkan dosen, tetapi apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, dinamika lingkungan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan dunia kerja menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi untuk secara berkala mengevaluasi dan memperbarui kurikulumnya.

Karena itu, ia berharap



WAKIL Rektor 1, Dr. Sudirman S.KM M.Kes saat membuka kegiatan lokakarya kurikulum OBE, Fisip Universitas Muhammadiyah Palu. **FOTO: FERY**

pengembangan kurikulum di FISIP Unismuh Palu tidak berhenti pada pemenuhan aspek regulasi maupun administrasi akademik, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan pembangunan daerah, pemerintahan, masyarakat, dan dunia profesional.

“Melalui OBE, kita ingin lulusan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kompetensi yang jelas, terukur, dan relevan. Ini bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat daya saing lulusan,” katanya.

Sementara itu, Dekan FISIP Unismuh Palu, Dr. Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si., mengatakan lokakarya tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan FISIP.

Dasril menilai penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak semestinya hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Kurikulum harus menjadi fondasi dalam membentuk lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional, sosial, sekaligus karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Melalui lokakarya ini, kami ingin menyamakan persepsi seluruh unsur akademik mengenai bagaimana kurikulum berbasis OBE diterapkan secara konkret dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Ia menjelaskan, FISIP Unismuh Palu berupaya membangun keterkaitan yang kuat antara profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), metode pembelajaran, hingga sistem asesmen. Keselarasan tersebut dinilai penting agar proses pembelajaran tidak berjalan secara parsial, melainkan seluruh komponennya saling mendukung dalam mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap hasil lokakarya dapat menghasilkan kurikulum yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja. FISIP harus mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, pemecahan masalah, komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan,” tambahnya.

han,” tambahnya.

Dalam lokakarya tersebut, FISIP Unismuh Palu menghadirkan dua narasumber yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pendidikan tinggi, yakni Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Moh. Irfan Muf-ti, M.Si., dan Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si.

Kedua narasumber memberikan penguatan mengenai konsep dan implementasi OBE, termasuk strategi menyusun kurikulum yang mampu menghubungkan setiap mata kuliah dengan capaian kompetensi lulusan secara terukur.

Lokakarya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen FISIP Unismuh Palu untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat mutu pembelajaran sekaligus meningkatkan daya saing lulusan dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang semakin dinamis. **FERY**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Dr. Indah Ahdlah, S.Sos., M.Si
Ketua BPH



Prof. Dr. H. Rajindra Rum, SE, MM
Rektor



Dr. Sudirman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I



Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II



Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Wark III



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Wark IV

Ketua PWM Sulteng Minta Panitia Penerimaan Tanwir 2026 Luruskan Niat



(DARI Kanan ke Kiri) Ketua PWM Sulteng Muh. Amin Parakkasi S.Ag., M.H.I., Sekretaris Panitia Penerimaan Tanwir 2026 Dr. Moh Rizal Masdul, S.Pd., M.Pd., dan Ketua Panitia Penerimaan Tanwir 2026 Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM pada rapat perdana kepanitiaan, Kamis (3/9/2026) sore. **FOTO: AMILUDDIN**

SULTENG RAYA-Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah (Sulteng) Muh. Amin Parakkasi, S. Ag., M.H.I. meminta kepada para Panitia Penerimaan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Sulawesi Tengah untuk meluruskan niat dan mengiklaskan diri untuk berkorban memberikan yang terbaik pada kegiatan tersebut.

Hal itu disampaikan pada rapat perdana Panitia Penerimaan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Aula Rektorat Unismuh Palu, Kamis (3/9/2026) sore.

Katanya, kegiatan Tanwir jangan dibayangkan seperti panitia 17 Agustus, kegiatan ini cukup berat karena berlangsung lebih dari satu hari, serta tidak hanya menghadirkan peserta Tanwir dari 38 provinsi di Indonesia, melainkan juga akan menghadirkan orang

nomor satu di negeri ini.

Ia menyebut, ini adalah sebuah perjuangan yang akan berdampak besar kedepan. Sekaligus ini adalah Tanwir perdana yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah. “Kita adalah pelaku sejarah, ini yang pertama kalinya dilakukan di Sulteng. Untuk itu fokus pada tugas dan tanggungjawab masing-masing,” pesan Amin Parakkasi. Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Tanwir Muhammadiyah 2026, Prof.

Dr. H. Rajindra, SE., MM menyampaikan, jika penunjukan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan Tanwir 2026 merupakan sebuah kehormatan bagi Warga Muhammadiyah Sulawesi Tengah.

“Ini adalah sebuah kehormatan bagi Muhammadiyah Sulteng, karena kita diberi amanah sebagai penerima tamu Tanwir, sebuah kegiatan yang sangat strategis, karena segala yang dibahas di Mukhtar ke-49 di Medan pada Tahun 2027 diputuskan di Tanwir ini,” ujar Prof Rajindra.

Di kesempatan tersebut, Prof Rajindra juga mengingatkan kepada para Panitia Penerima Tanwir Muhammadiyah 2026 agar mempersiapkan diri melakukan pengukuhan pada Hari Sabtu, 5 September 2026, di GBK Rusy Toana, Kompleks Unismuh Palu. **ENG**

SULTENG RAYA - Dua proposal Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu dinyatakan lolos dan menerima Pendanaan Program Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa) Tahun Anggaran 2026.

Kepastian tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1033/DSI/C3/DT.05.00/2026 tanggal 28 Agustus 2026 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Program Kosabangsa Tahun Anggaran 2026.

Dua proposal yang berhasil lolos tersebut masing-masing berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana serta pengembangan teknologi energi terbarukan berbasis masyarakat.

Proposal pertama berjudul “Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascagempa Bumi melalui Penguatan Produktivitas, Peningkatan Mutu, dan Hilirisasi Kakao Berbasis Inovasi Teknologi di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi”.

Proposal tersebut diajukan oleh Rosmaniar Gailea, dosen Universitas Tadulako sebagai institusi pendamping. Hasyriyanti ditetapkan sebagai bagian dari tim pendamping. Sementara proposal kedua berjudul “Edukasi Pengembangan Teknologi Tenaga Surya bagi Kelompok Nelayan dan POKDARWIS Berbasis Green Ekonomi sebagai Penyanga Utama Ekonomi Pasca Gempa di Sirenja, Kabupaten Donggala”.



Rajindra dan Rukhayati

Proposal tersebut diajukan oleh Rukhayati, dosen Universitas Negeri Makassar sebagai institusi pendamping dan Bakhriani A. Rauf sebagai pendamping.

Program Kosabangsa merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat melalui penerapan teknologi serta inovasi dalam menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para dosen pengabdian yang berhasil memperoleh pendanaan Kosabangsa Tahun Anggaran

2026.

Ia berharap para dosen penerima pendanaan dapat menjalankan program secara maksimal bersama mahasiswa dan institusi pendamping.

“Selamat kepada dosen pengabdian yang dinyatakan lolos proposalnya. Silakan menjalankan pengabdiannya bersama mahasiswa dan institusi pendampingnya. Jalankan itu dengan baik sebagaimana tujuan dari program itu sendiri,” ujar Prof. Rajindra.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh pendanaan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai mitra pengabdian.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unismuh Palu, Dr. Rukhayati, SE., MM, menjelaskan bahwa terdapat empat proposal yang sebelumnya diajukan Unismuh Palu dalam Program Kosabangsa Tahun

Anggaran 2026.

Dari empat proposal tersebut, dua proposal dinyatakan lolos setelah melalui sejumlah tahapan seleksi, termasuk seleksi administrasi, substansi, kunjungan lapangan, dan wawancara.

“Proposal yang kami kirim ada empat, dinyatakan lolos ada dua. Alhamdulillah, ada yang lolos dua. Kami bersyukur,” ujar Rukhayati.

Ia menjelaskan, proposal yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan substansi selanjutnya diwajibkan mengikuti tahapan kunjungan lapangan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program sekaligus melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi lokasi mitra.

Hasil penilaian pada tahap seleksi substansi dan kunjungan lapangan kemudian menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan penerima pendanaan Program Kosabangsa.

Menurut Rukhayati, keberhasilan dua proposal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas proposal pengabdian yang diajukan para dosen Unismuh Palu.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para dosen lainnya untuk terus meningkatkan kualitas program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap tahun depan lebih banyak lagi proposal yang dinyatakan lolos,” harap Rukhayati. **ENG**